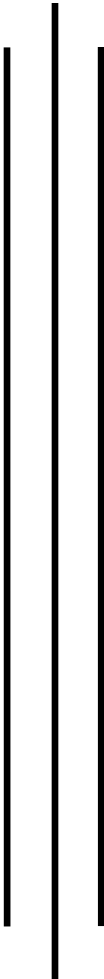


LAMPIRAN XXIV : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2027





PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2027



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2027 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (Renja) memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu untuk periode satu tahun.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 22 Juli 2026
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

LEO PUTRA, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan..... 8

1.4. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun 2025) Dinas Perhubungan Kota Batam 10

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025..... 13

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan 13

2.4. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 27

2.5. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Dinas Perhubungan 29

3.2. Arah dan Kebijakan Tahun 2027 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 33

4.2. Dukungan Program Renja Dinas Perhubungan Tahun 2027 dalam Menanggulangi Kemiskinan 46

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .. 48

BAB VI PENUTUP

5.1. Catatan Penting..... 50

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 51

5.3. Rencana Tindak Lanjut..... 52

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1. Capaian atas Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025	11
II.2. Capaian atas Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025	12
II.3. Capaian atas Target Kinerja Program Dinas Pehubungan Kota Batam Tahun 2025.....	14
II.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam s/d Tahun 2025	18
II.5. Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 pada Dinas Perhubungan Kota Batam	27
III.1. Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam	29
III.2. Dukungan Program Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Prioritas Nasional	31
III.3. Dukungan Program Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	32
IV.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027.....	34
IV.2. Dukungan Program Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027.....	47
V.1. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam	48
V.2. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam	48
V.3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Batam	49

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	3
1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Perhubungan, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

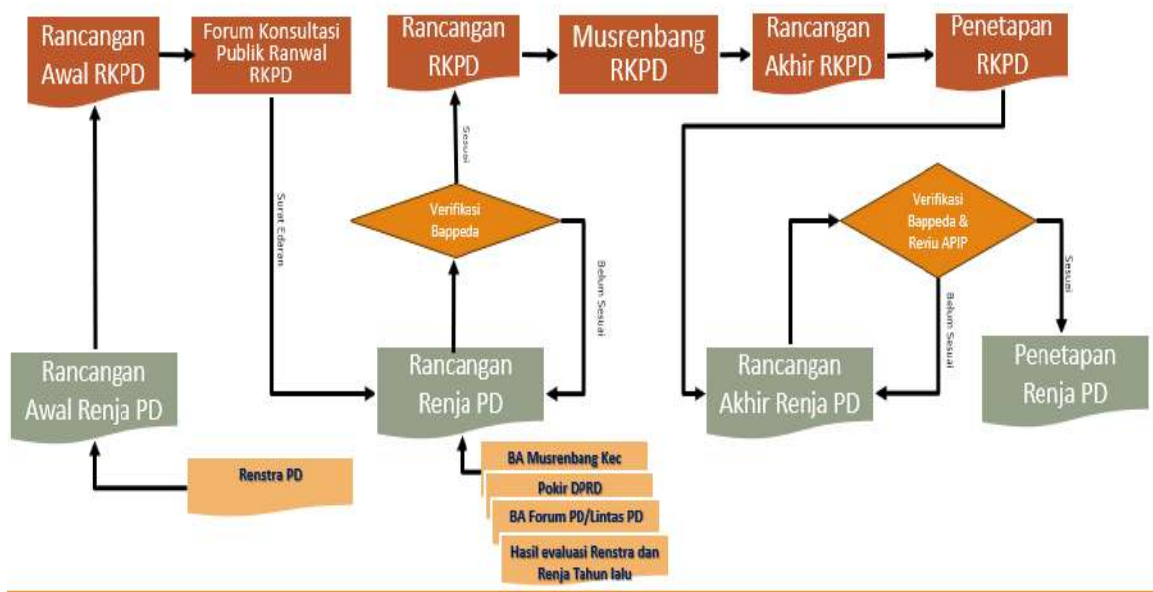
Rencana kerja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Rencana kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PD

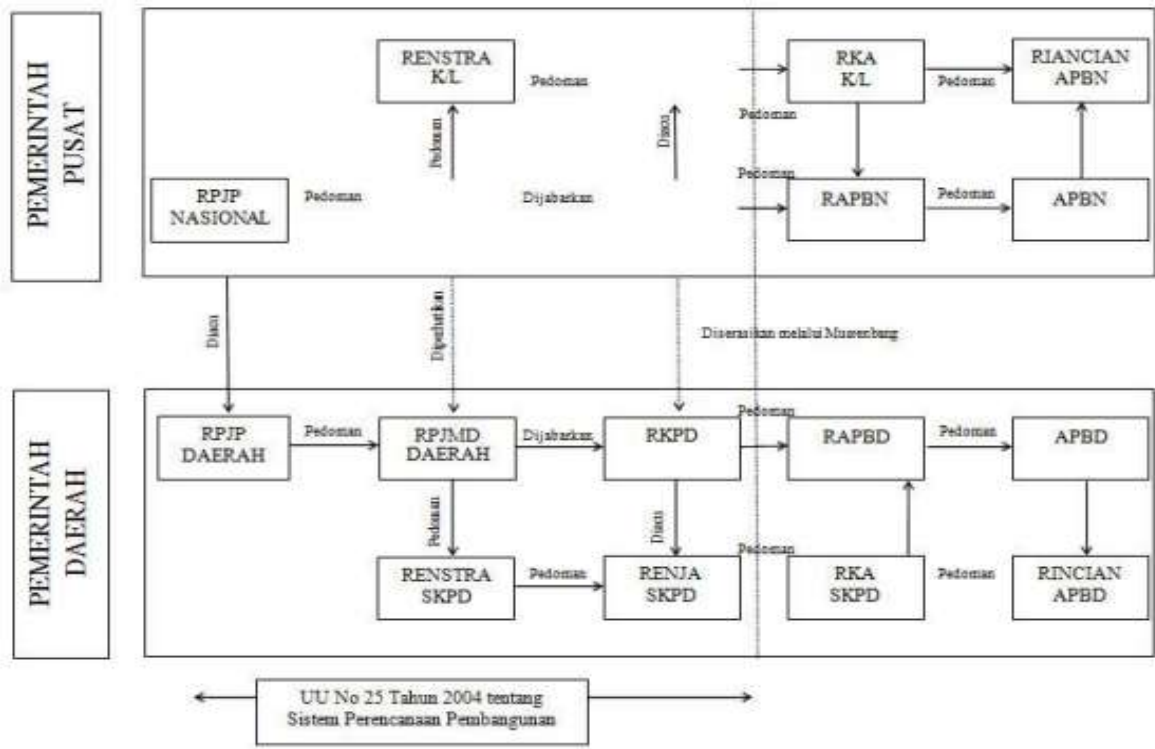


1.1.1.3. Keterkaitan Antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Rencana kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No.69);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1643);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2027 secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam :

1. Menjabarkan sasaran dan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 serta RKPD Kota Batam Tahun 2027 ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan;
2. Menyediakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027;
3. Menyelaraskan program prioritas Dinas Perhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat/pokok-pokok pikiran DPRD;
4. Menjadi tolok ukur dan instrumen evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penulisan, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi capaian kinerja bidang urusan, evaluasi capaian SPM, rumusan permasalahan dan isu strategis, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, dan inovasi bidang urusan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan kebijakan nasional/provinsi/kota, tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan Tahun 2027.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

memuat rincian program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pagu indikatif Tahun 2027.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN LALU

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN (IKU dan IKK TAHUN 2025) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang terkait perhubungan, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di bidang perhubungan, termasuk pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembangunan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan transportasi, serta kualitas pelayanan transportasi darat dan laut guna mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2025 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2030. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian pada akhir Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran strategis.

TABEL II.1.
CAPAIAN ATAS TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	STATUS KINERJA RKPD 2025	TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2030)
1	Rasio Konektivitas Darat	Nilai	0,909	0,900	0,900	100%	ST	0,909
2	Rasio Konektivitas Laut	Nilai	0,583	0,583	0,583	100%	ST	0,750
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Nilai	90,420	91,465	89,770	98%	ST	90,58

Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, indikator kinerja utama diukur melalui tiga komponen sebagaimana disajikan pada tabel kedua:

1. Rasio Konektivitas Darat, meningkat dari baseline 2024 sebesar 0,818 menjadi realisasi 0,900 pada tahun 2025, terhadap target sebesar 0,909. Capaian kinerja sebesar 99% menunjukkan progres positif menuju target akhir periode Renstra 2030 sebesar 0,909, yang praktis telah hampir tercapai lebih cepat dari jadwal.
2. Rasio Konektivitas Laut, dengan baseline, target, dan realisasi yang konsisten pada angka 0,583, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian, dengan target akhir periode Renstra 2030 sebesar 0,750, diperlukan upaya peningkatan yang lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang untuk mengejar selisih sebesar 0,167 poin.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Perhubungan, meningkat dari baseline 90,220 dengan target 90,420 dan realisasi 89,770, sehingga capaian kinerja sebesar 99%. Meskipun realisasi sedikit di bawah target, nilai indeks tersebut masih berada pada kategori sangat memuaskan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Berada di bawah IKU dalam hierarki indikator kinerja, IKK mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. IKK mencerminkan kinerja sektor atau bidang tertentu yang menjadi bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam dokumen perencanaan, IKK menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

TABEL II.2.
CAPAIAN ATAS TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN 2025	CAPAIAN KINERJA (%)	STATUS KINERJA RKPD 2025	TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2030)
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,811	0,805	99%	ST	0,861
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persentase	15%	19%	127%	ST	100%
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persentase	100%	100%	100%	ST	100%

Berdasarkan Tabel II.2 terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), terdapat tiga sasaran strategis yang diukur pada Tahun 2025:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota, dengan target capaian sebesar 0,811 dan realisasi sebesar 0,805, sehingga capaian kinerja mencapai 99%. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini masuk dalam kategori status kinerja "Sesuai Target" (ST) mengingat deviasi yang sangat kecil terhadap target yang ditetapkan.

2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota, dengan target 15% berhasil direalisasikan sebesar 19%, sehingga capaian kinerja mencapai 127%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemenuhan kelengkapan sarana jalan.
3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan, dengan target dan realisasi yang sama-sama mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau tercapai penuh sesuai target.

2.2. EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, urusan perhubungan tidak termasuk dalam 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh karena itu, evaluasi capaian SPM Tahun 2023–2025 tidak disajikan pada dokumen ini, dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 dilakukan dengan

membandingkan target Renstra Tahun 2027, realisasi sampai dengan Tahun 2024, target dan realisasi Renja Tahun 2025, target Renja Tahun 2026, serta perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2026, sebagaimana disajikan pada Tabel T.C-29. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi kinerja 100% dan serapan anggaran 89,97% dari pagu Rp127.483.174.156,00, sehingga dikategorikan Tinggi (T), realisasi capaian target Program, disajikan pada Tabel berikut.

TABEL II.3.
CAPAIAN ATAS TARGET KINERJA PROGRAM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2025

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 YANG DI EVALUASI		CAPAIAN TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025		KATEGORI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026	
				KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40.240.637.925		33.690.312.636		83,72%		T
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Nilai	90,42		89,77		99%		ST	
		Nilai SAKIP PD	Nilai	72,81		72,81		100%		ST	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				81.065.369.383		75.265.529.634		92,85%		ST
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	Persentase	63		65		103%		ST	
		Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Persentase	5		34,27		685%		ST	
		Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	Persentase	50		47,41		95%		ST	
		Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	Persentase	10		8,6		86%		ST	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				6.177.166.848		5.762.996.401				ST
		Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	Persentase	130		147		113%		ST	
		Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia	Persentase	69		68,89		100%		ST	
					127.483.174.156		114.718.838.671		89,99%		

Uraian evaluasi per program adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja program ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 ditargetkan 71,78 dan terealisasi 71,78 (capaian 100%), meningkat dari realisasi Tahun 2024 sebesar 70,03, dengan target Renstra Tahun 2027 sebesar 74,53. Sementara itu, Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan ditargetkan 90,42 pada Tahun 2025 dan terealisasi 89,77 (capaian 99%), sedikit di bawah target namun tetap menunjukkan tren positif menuju target Renstra Tahun 2027 sebesar 90,48. Pada tataran kegiatan, seluruh indikator kegiatan penunjang — administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, dan peningkatan pelayanan BLUD — telah terealisasi 100% sesuai target, kecuali kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang pada Tahun 2024 baru terealisasi 90,55% sebelum mencapai 100% pada Tahun 2025.

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian yang bervariasi. Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia terealisasi 65% dari target 63% (capaian 103%), melampaui target menuju sasaran Renstra Tahun 2027 sebesar 80%. Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR ditargetkan 50% namun hanya terealisasi 47% (capaian 94%), disebabkan masih banyaknya pemilik kendaraan wajib uji yang belum memiliki kesadaran melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor. Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani Trans Batam ditargetkan 10% dan terealisasi 8,6% (capaian 86%), dipengaruhi keterbatasan prasarana halte/shelter termasuk

pembongkaran sejumlah halte akibat pembangunan infrastruktur jalan belum tersedianya angkutan pengumpan (feeder), serta peralihan sebagian masyarakat ke transportasi daring (online); meski demikian, indikator turunannya yaitu persentase tingkat pelayanan operasional Bus Trans Batam justru melampaui target (42% terhadap target 40%, capaian 105%). Persentase peningkatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ditargetkan hanya 5% namun terealisasi 34% (capaian 680%), didorong optimalisasi kinerja UPTD Pelayanan Parkir Kota Batam, meskipun indikator kegiatan penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) baru baru terealisasi 593 SRP dari target 1.147 SRP (capaian 52%) yang perlu menjadi perhatian pada Tahun 2027. Kegiatan-kegiatan pendukung lain, yaitu penyediaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan audit/inspeksi keselamatan LLAJ, seluruhnya terealisasi 100% sesuai target.

3) Program Pengelolaan Pelayanan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia terealisasi 69% sesuai target Renja 2025, dengan realisasi kumulatif s.d. Tahun 2024 telah mencapai 100% dari kebutuhan dasar dan diarahkan menuju target Renstra Tahun 2027 sebesar 80%; capaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan dermaga tercatat 4 unit sesuai target Tahun 2025 menuju target Renstra 8 unit pada Tahun 2027. Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi laut yang dilayani Dinas Perhubungan ditargetkan 130% dan terealisasi 147% (capaian 113%), dengan jumlah unit transportasi laut yang beroperasi tercapai 7 unit sesuai target. Pencapaian yang jauh melampaui target ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan jumlah penumpang — sebelumnya hanya mencakup penumpang transportasi laut umum, namun sejak Tahun

2025 sesuai Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, cakupan diperluas dengan memasukkan penumpang angkutan anak sekolah — sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah penumpang yang tercatat.

Berdasarkan uraian tersebut, dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang dievaluasi, 6 (enam) indikator mencapai atau melampaui target Renja Tahun 2025, sedangkan 2 (dua) indikator persentase kelulusan uji KIR dan persentase peningkatan penumpang Trans Batam belum memenuhi target namun tetap berada pada kisaran capaian tinggi (di atas 85%), sehingga secara keseluruhan pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan progres pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 sampai dengan Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik dan berada pada jalur (on-track) menuju target akhir Renstra Tahun 2029.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2025, mencakup target Renstra Tahun 2027, realisasi sampai dengan Tahun 2024, target dan realisasi Renja Tahun 2025, target Renja Tahun 2026, serta perkiraan realisasi capaian target Renstra, disajikan pada Tabel T.C-29 berikut.

TABEL II.4
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM S/D TAHUN 2025

Tabel T.C-29 (saduran Permendagri 86/2017)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan (Satuan:Nilai)	74,53	70,03	71,78	71,78	100%	73,53	73,53	100%
2.15.01.2.01	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Satuan:Persentase)	100	-	-	-	0%	100	100	100%
2.15.01.2.01.0001	SUBKEGIATAN:Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan:Dokumen)	2	-	-	-	0%	2	2	100%
2.15.01.2.01.0007	SUBKEGIATAN:Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan:Laporan)	3	-	-	-	0%	3	3	100%
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan (Satuan:Nilai)	90,48	-	90,42	89,77	99%	90,45	90,45	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.02	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.02.0001	SUBKEGIATAN:Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan:Orang/bulan)	213	87	191	191	100%	210	210	100%
2.15.01.2.02.0002	SUBKEGIATAN:Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan:Dokumen)	17	-	17	17	100%	17	17	100%
2.15.01.2.05	KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Satuan: Persentase)	100	-	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.05.0002	SUBKEGIATAN:Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Satuan:Paket)	0	-	-	-	0%	-	-	0%
2.15.01.2.05.0009	SUBKEGIATAN:Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan:Orang)	11	-	1	1	100%	5	5	100%
2.15.01.2.06	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.06.0001	SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket)	3	3	3	3	100%	2	2	100%
2.15.01.2.06.0002	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket)	4	5	4	4	100%	4	4	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.06.0004	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan:Paket)	1	2	1	1	100%	1	1	100%
2.15.01.2.06.0005	SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan:Paket)	2	2	2	2	100%	2	2	100%
2.15.01.2.06.0009	SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan:Laporan)	30	25	17	16	94%	37	78	100%
2.15.01.2.07	KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.07.0002	SUBKEGIATAN: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Satuan:Unit)	3	-	3	3	100%	0	0	0%
2.15.01.2.07.0005	SUBKEGIATAN: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Satuan:Unit)	44	2	32	32	100%	20	54	100%
2.15.01.2.07.0006	SUBKEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan:Unit)	22	7	17	17	100%	10	34	100%
2.15.01.2.08	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi (Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.08.0002	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan:Laporan)	4	12	12	12	100%	5	5	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.08.0004	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan:Laporan)	13	13	13	13	100%	13	13	100%
2.15.01.2.09	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Satuan:Persentase)	100	90,55	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.09.0001	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Satuan:Unit)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2.15.01.2.09.0002	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan:Unit)	22	20	22	22	100%	22	22	100%
2.15.01.2.09.0006	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan:Unit)	140	60	90	90	100%	147	147	100
2.15.01.2.09.0009	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Satuan:Unit)	0	-	-	-	0%	1	1	100%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia (Satuan:Persentase)	80	60	63	65	100%	71	71	100%
2.15.02.2.01	KEGIATAN: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun (Satuan:Persentase)	0	100	-	-	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.01.0001	SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Satuan:Dokumen)	0	1	0	-	100%	-	-	100%
2.15.02.2.02	KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun (Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.15.02.2.02.0001	SUBKEGIATAN: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Satuan:Unit)	14	2	12	12	100%	8	22	100%
2.15.02.2.02.0002	SUBKEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan:Unit)	458	183	441	441	100%	310	934	100%
2.15.02.2.02.0003	SUBKEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Satuan:Unit)	13	1	6	6	100%	1	8	62%
2.15.02.2.02.0004	SUBKEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Satuan:Unit)	79	11	55	55	100%	111	177	100%
2.15.02.2.06	KEGIATAN: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Persentas pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun (Satuan: Persentase)	100	56	100	100	100%	100	100	100%
2.15.02.2.06.0013	SUBKEGIATAN: Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Satuan:Unit)	2	1	3	3	100%	1	5	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.06.0016	SUBKEGIATAN: Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Satuan:Dokumen/Unit)	44	41	41	41	100%	43	43	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR (Satuan:Persentase)	59	49	50	47	94%	53	53	100%
2.15.02.2.05	KEGIATAN: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan kegiatan PKB (Satuan: Persentase)	100	67	100	100	100%	100	100	100%
2.15.02.2.05.0001	SUBKEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Satuan:Unit)	6	1	0	0	0%	1	1	100%
2.15.02.2.05.0004	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Satuan:Dokumen)	7.500	5.000	5600	5600	100%	5000	5000	100%
2.15.02.2.05.0007	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Satuan:Unit)	2	2	2	2	100%	3	3	100%
2.15.02.2.08	KEGIATAN: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan (Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.08.0004	SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Satuan:Laporan)	32	32	32	32	100%	32	96	100%
2.15.02.2.08.0007	SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Satuan:Laporan)	0	0	1	1	100%	0	0	0%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia (Satuan:Persentase)	80	100	69	69	100	73	73	100%
2.15.03.2.12	KEGIATAN: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan (Satuan:Unit)	8	4	4	4	100%	7	7	100%
2.15.03.2.12.0002	SUB KEGIATAN: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Satuan:Unit)	3	3	0	0	0%	1	4	100%
2.15.03.2.12.0003	SUB KEGIATAN: Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Satuan:Unit)	5	1	4	4	0%	3	8	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	90,48	-	90,42	89,77	99%	90,45	90,45	100%
2.15.01.2.10	KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD (Satuan:Persentase)	100	90	100	100	100%	100	100	100%
2.15.01.2.10.0001	SUBKEGIATAN: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Satuan:Unit Kerja)	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam) (Satuan:Persentase)	13	-	10	8,6	86%	12	12	100%
2.15.02.2.09	KEGIATAN : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Satuan:Persentase)	44	-	40	42	100%	42	42	100%
2.15.02.2.09.0003	SUBKEGIATAN: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan:Unit)	73	48	62	50	81%	69	69	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Satuan:Persentase)	9	-	130	147	100%	24	24	100%
2.15.03.2.06	KEGIATAN: Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah unit Transportasi Laut yang beroperasi (Satuan:Unit)	9	-	7	7	100%	8	100%	
2.15.03.2.06.0004	SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Satuan:Laporan)	9	-	7	7	100%	8	8	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (Satuan:Persentase)	5	-	5	34	100%	5	5	100%
2.15.02.2.04	KEGIATAN: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru (Satuan:SRP)	1264	-	1147	593	52%	1204	1797	100%
2.15.02.2.04.0002	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan:Laporan)	12	12	12	12	100%	12	12	100%

2.4. TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2027 disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL II.5
TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2027
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PENGUSUL	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS
(1)			(3)	(2)	(5)				
1	Muhammad Yunus Muda, S.E.	Pembangunan ZoSS	SDN 006 Bengkong	Verifikasi TAPD	1	Unit	P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Pembangunan ZoSS bertujuan meningkatkan keselamatan penyeberangan dan keamanan peserta didik di kawasan sekolah. Pelaksanaan disesuaikan dengan hasil survei teknis dan kemampuan keuangan daerah.
2	Muhammad Fadhi	Pembangunan ZoSS	SDN 010 Sei Lekop	Verifikasi TAPD	1	Unit	P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Pembangunan ZoSS bertujuan meningkatkan keselamatan penyeberangan dan keamanan peserta didik di kawasan sekolah. Pelaksanaan disesuaikan dengan hasil survei teknis dan kemampuan keuangan daerah.
3	Muhammad Fadhi	Pembangunan ZoSS	SDN 007 dan SDN 009 Sagulung Kota (Sekolah Berhadapan)	Verifikasi TAPD	1	Unit	P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Dinas Perhubungan. Mengingat kedua sekolah berada saling berhadapan, pembangunan ZoSS dinilai mendukung peningkatan keselamatan pengguna jalan dan pelajar di kawasan sekolah. Pelaksanaan akan disesuaikan dengan kondisi eksisting dan ketersediaan anggaran.
4	Muhammad Mustofa, SH, MH	Pembangunan Pedestrian	Jalan Lintas Bukit Kemuning RW 16 Kel Mangsang Kec Sei Beduk	Verifikasi TAPD	200	M'	P5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dapat ditindaklanjuti untuk dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan, dengan tujuan mendukung peningkatan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Pelaksanaannya akan disesuaikan berdasarkan kondisi eksisting di lapangan, skala prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

2.5. INOVASI BIDANG URUSAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Batam mengembangkan sejumlah inovasi pelayanan pada bidang urusan perhubungan, antara lain:

1. Penerapan smart transportation system dan GPS tracking armada Trans Batam untuk memantau dan menurunkan rata-rata waktu tempuh perjalanan;
2. Pemanfaatan teknologi traffic management system (Traffic Light/ATCS) untuk pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas secara terintegrasi;
3. Penerapan sistem pembayaran non tunai pada layanan parkir dan retribusi pelabuhan;
4. Penguatan command center perhubungan untuk monitoring pelayanan transportasi secara real time;
5. Peningkatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (operator transportasi, pengelola pelabuhan, dan bandar udara) guna efisiensi layanan dan integrasi antarmoda

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Renja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada BAB II, serta mengacu pada Lampiran Perwako RKPD Kota Batam Tahun 2027. Target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2027 ditetapkan sebagai berikut:

TABEL III.1

TARGET TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2027

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2027
TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam	Rasio Konektivitas Kota	0,861
SASARAN 1: Meningkatnya Konektivitas Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909
SASARAN 2: Meningkatnya Konektivitas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,750
SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan	90,48

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam” diukur melalui Rasio Konektivitas Kota, dengan target sebesar 0,761 pada Tahun 2027, meningkat dari kondisi awal (baseline) sebesar 0,748 pada Tahun 2025. Pencapaian tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu peningkatan kualitas layanan angkutan darat, peningkatan konektivitas laut, dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Dinas Perhubungan.

3.2. ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2027

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2030. Arah kebijakan tersebut juga memperhatikan kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, serta prioritas pembangunan Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.

Dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, arah kebijakan Dinas Perhubungan difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Kebijakan ini selaras dengan upaya Pemerintah Pusat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang andal guna memperkuat daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan RKPD Kota Batam Tahun 2027 yang menempatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Dinas Perhubungan berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan angkutan umum massal, peningkatan pelayanan transportasi laut,

pengembangan fasilitas keselamatan lalu lintas, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Batam turut memberikan dukungan terhadap pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2027, yang terlihat pada tabel berikut:

TABEL III.2
DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2027	PAGU 2027
PRIORITAS NASIONAL 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	79.248.756.759
	2. Program Pelayaran	17.656.704.130

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi, optimalisasi pelayanan angkutan umum Trans Batam, pengembangan konektivitas transportasi darat dan laut, peningkatan keselamatan transportasi, serta pengembangan sistem transportasi berbasis digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, meningkatkan akses menuju kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan sentra ekonomi, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung penciptaan lapangan kerja.

Selain mendukung prioritas nasional, arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, sebagaimana tercantumm pada tabel berikut:

TABEL III.3
DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2027	DUKUNGAN PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2027	PAGU 2027
PRIORITAS 2: Pengembangan Konektivitas Antarwilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	79.248.756.759
	2. Program Pelayaran	17.656.704.130

Dukungan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan pelayanan transportasi yang aman dan berkeselamatan, pengembangan kawasan ekonomi dan maritim, serta peningkatan daya saing wilayah kepulauan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi, peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dan transportasi laut, pengembangan simpul-simpul transportasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi guna mendukung konektivitas antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2027

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, hasil evaluasi capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025 (BAB II), serta hasil penyelarasan dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil verifikasi Bappeda Kota Batam terhadap Rancangan Awal Renja.

Rencana kerja dan pendanaan mencakup 3 (tiga) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan Program Pengelolaan Pelayaran, dengan total pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp140.839.777.145,00. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, dan pagu indikatif disajikan pada tabel berikut.

TABEL IV.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2027

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		140.839.777.145											208.889.969.754	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		140.839.777.145											208.889.969.754	
					DINAS PERHUBUNGAN		140.839.777.145											208.889.969.754	
2	15	01			P R O G R A M P E N U N J A N G P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Nilai SAKIP PD	78,53	74,53 Nilai	43.934.316.256							76,53	57.073.265.350	Dinas Perhubungan	
						Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	90,54	90,48 Nilai								90,51		Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persentase	7.155.100							100	22.950.600	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3.876.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PENERINTAH DAERAH	2	11.309.800	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3.278.900	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	3	11.640.800	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persentase	27.781.906.676								100	36.518.559.028	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		201 Orang/bulan	27.585.326.676	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	220	36.307.979.028	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16 Dokumen	196.580.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	17 Dokumen	210.580.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 Persentase	202.669.800								100	113.328.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	147.292.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		ASN DINAS PERHUBUNGAN	0	0	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	55.377.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PENERINTAH DAERAH	12	113.328.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persentase	202.834.900							100	461.711.850	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	11.799.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PENERINTAH DAERAH	3	140.544.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	20.019.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PENERINTAH DAERAH	4	112.562.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	17.500.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PENERINTAH DAERAH	1	17.500.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	20.019.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	2	28.755.650	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	133.496.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	32	162.350.200	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persentase	306.107.600							100	496.664.530	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		34 Unit	122.376.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	68	193.454.810	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	183.731.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	32	303.209.720	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persentase	1.651.194.240								100	1.201.022.520	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.220.500.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	4	1.030.503.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	430.693.640	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	13	170.519.520	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persentase	871.394.190								100	964.809.609	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	42.640.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	1	38.880.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22 Unit	694.877.590	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	22	764.365.349	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		198 Unit	133.876.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	151	161.564.260	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD		100 Persentase	12.911.053.750								100	17.294.219.213	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	12.911.053.750	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	1	17.294.219.213	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	93	80 Persentase	79.248.756.759								87	129.200.360.556	Dinas Perhubungan
						Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	14	13 Persentase									13		Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
						Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	70	59 Persentase								65		Dinas Perhubungan	
						Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Topi Jalan Umum	10	5 Persentase								10		Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun		100 Persentase	5.652.286.700							100	11.289.245.113	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		10 Unit	4.258.927.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		MASYARAKAT	14	4.580.443.681	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		150 Unit	719.102.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		MASYARAKAT	353	5.886.487.842	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang Terpelihara		6 Unit	364.430.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas. Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		MASYARAKAT	15	598.198.590	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		105 Unit	309.827.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		MASYARAKAT	67	224.115.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru		1264 SRP	10.197.221.600							1328	20.000.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		12 Laporan	10.197.221.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		PEMERINTAH DAERAH	12	20.000.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan kegiatan PKB		100 Persentase	807.042.000							100	877.894.000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		2 Unit Unit	178.222.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		PEMERINTAH DAERAH	3 Unit	203.909.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		7 5 0 0 Dokumen	248.520.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		PEMERINTAH DAERAH	7500	269.572.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		3 Unit	380.300.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		PEMERINTAH DAERAH	2	404.413.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun		1 0 0 Persentase	9.597.565.184							100	6.412.320.596	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		2 Unit	403.440.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektifitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		MASYARAKAT	2	341.894.696	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		4 Dokumen	9.194.124.384	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikuatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana praserana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		MASYARAKAT	45 Unit	6.070.425.900	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan		100 Persentase	392.689.600							100	213.700.000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		32 Laporan	392.689.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikuatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		PEMERINTAH DAERAH	32	213.700.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		44 Persentase	52.601.951.675							50	90.407.200.847	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		73 Unit	52.601.951.675	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikuatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	-Kemiskinan	PEMERINTAH DAERAH	83	90.407.200.847	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia	93	80 Persentase	17.656.704.130							87	22.616.343.848	Dinas Perhubungan	
						Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	3	9 Persentase								3		Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi		9 Unit	4.621.579.630							9	5.878.812.048	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Laperan	4.621.579.630	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektiftas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar		PEMERINTAH DAERAH	9	5.878.812.048	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan		8 Unit	13.035.124.500							8	16.737.531.800	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		2 Unit	12.140.923.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektiftas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	-Kemiskinan	MASYARAKAT	3	12.923.444.600	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional						Provinsi	Daerah
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		2 Unit	894.201.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikatif serta Mengembangkan Agromaritim	-Prioritas Provinsi 2. Pengembangan Konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana	-Prioritas Kota Batam 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar	-Kemiskinan	MASYARAKAT	5	3.814.087.200	Dinas Perhubungan
					TOTAL:					140.839.777.145		208.889.969.754							

4.2. DUKUNGAN PROGRAM RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2027 DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Dinas Perhubungan Kota Batam berkomitmen mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan di bidang perhubungan. Dukungan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada strategi nasional yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Peran Dinas Perhubungan dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pengembangan jaringan transportasi darat dan laut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2027, dukungan terhadap pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain penyediaan layanan angkutan umum perkotaan (Trans Batam) dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut yang diperuntukkan bagi masyarakat pada wilayah hinterland yang membutuhkan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dengan biaya transportasi yang lebih efisien.

Melalui program tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batam berkontribusi dalam mendukung agenda penanggulangan kemiskinan secara terpadu bersama perangkat daerah lainnya. Meskipun tidak secara langsung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, penyediaan layanan transportasi yang berkualitas merupakan salah satu bentuk intervensi strategis dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Batam. Untuk mencapai target tersebut direncanakan program yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2.
DUKUNGAN PROGRAM RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2027

Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
							Kinerja	Pagu Renja
DINAS PERHUBUNGAN								65.637.076.175
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					52.601.951.675
		2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				52.601.951.675
	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.15.02.2.09.0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	73	52.601.951.675
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					13.035.124.500
		2.15.03.2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				13.035.124.500
	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.15.03.2.12.0002			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	2	12.140.923.500
	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	2.15.03.2.12.0003			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	2	894.201.000

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan Tahun 2027 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertera pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang RKPD Kota Batam Tahun 2027.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perhubungan Kota Batam adalah Rasio Konektivitas, dengan target sebesar 0,861 pada Tahun 2027. Indikator ini merupakan komposit dari Rasio Konektivitas Darat dan Rasio Konektivitas Laut, yang menjadi ukuran keberhasilan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam, target Tahun 2027 dan realisasi Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut.

TABEL V.1

TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) TAHUN 2027

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
III. Aspek Daya Saing Daerah			
Rasio Konektivitas	Rasio	0,805	0,861

TABEL V.2

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2027

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2030
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,805	0,861
Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persentase	19%	53%
Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persentase	100%	100%

IKD dan IKK menjadi alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

TABEL V.3
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2027
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
Rasio Konektivitas Darat	Nilai	0,900	0,909
Rasio Konektivitas Laut	Nilai	0,583	0,750
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan	Nilai	89,770	90,48

Rasio Konektivitas Darat pada Tahun 2027 ditargetkan sebesar 0,909, konsisten dengan capaian yang telah direalisasikan sejak Tahun 2025 (0,900). Rasio Konektivitas Laut ditargetkan meningkat dari 0,583 pada Tahun 2025 menjadi 0,750 pada Tahun 2027 sejalan dengan rencana penambahan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan ditargetkan meningkat secara bertahap dari 90,42 (2025) menjadi 90,48 pada Tahun 2027, dengan realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 89,77 yang menjadi baseline evaluasi tahun berjalan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas

Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi,

RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pelayanan di bidang perhubungan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD